

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH BESAR

Raudhatun Wardani ^{*1}, Wida Fadhlia ^{*2}

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
e-mail: raudhahhasyim93@gmail.com ^{*1}, widafadhlia@unsyiah.ac.id ^{*2}

Abstrak

Land taxes and rural and urban buildings (PBB P2) are among the most important local taxes that have the potential to increase local revenues. The purpose of this study is to determine the level of effectiveness of tax revenue earth and rural and urban buildings and how much contribution to the original revenue area in Aceh Besar District. The method of analysis used in this study is descriptive analysis method where by collecting data for the next described and processed. The results of this study indicate that the level of effectiveness of PBB revenues P2 in the Greater Aceh district increases every year with the same target setting every year. The contribution of PBB P2 to local own revenues has increased and decreased, by 2015 increasing by 2.21% from the previous year which was only 2.06% and categorized very less, in 2016 its contribution even decreased to 1.96% is still categorized very less. It is hoped that the government will do socialization by pairing banners notices that the SPPT has been issued and can be taken in a place that has been shown such as Keuchik office so that the public can see and be motivated to pay tax.

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Land Tax and Rural and Urban Buildings, Local Own Revenue.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Reformasi menyebabkan adanya pemberian otonomi kepada daerah. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan agar daerah lebih mandiri dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah dalam memaksimalkan otonomi daerah dan melaksanakan pembangunan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang lainnya.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipungut dari masyarakat yang tidak mendapat imbalan secara langsung. Salah satu pajak daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Setelah

dilimpahkan menjadi pajak daerah pada tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah menjadi wewenang daerah dalam pemungutan dan pengelolaannya maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sepenuhnya masuk ke pendapatan asli daerah kabupaten/kota.

Penelitian ini mengambil tempat di Kabupaten Aceh Besar, dikarenakan Kabupaten Aceh Besar merupakan wilayah yang saat ini dijadikan daerah pengembangan, baik untuk pemukiman maupun investasi, sehingga akan terjadi pertumbuhan perekonomian, sehingga memiliki potensi besar untuk penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian yang sama telah dilakukan oleh Tirie (2016) yang meneliti di Kota Bitung, Tomohon, dan Manado.

Sejauh ini penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan walaupun masih kecil dengan target yang ditetapkan sama setiap tahunnya. Jika melihat luas daerah Kabupaten Aceh Besar maka

penerimaan PBB P2 yang diterima oleh daerah dapat lebih besar, dan target yang ditetapkan bisa melebihi target yang sekarang, sehingga kontribusi yang diberikan lebih besar. Kontribusi PBB P2 di Kabupaten Aceh Besar saat ini masih relatif kecil bahkan pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan hanya 1,96%.

1.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 di Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar.

2. Kajian Pustaka

2.1 Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:134), efektivitas di gunakan untuk mengukur berhasil tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja organisasi tersebut.

2.2 Kontribusi

Menurut Yandianto (2000:282), kontribusi adalah sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan. Kontribusi dapat di artikan sebagai sumbangan yang diberikan dari PBB P2 terhadap pendapatan asli daerah. Jika pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan PBB P2 dan potensi penerimaannya semakin tinggi maka kontribusi terhadap pendapatan asli daerah akan meningkat.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak bumi dan bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan suatu potensi yang harus terus diraih dalam meningkatkan penerimaan daerah dikeranakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang setiap masyarakat memilikinya.

2.4 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2012 menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Berikutnya, juga dijelaskan yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i. Menara.

2.5 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, subjek pajak diatas menjadi wajib pajak PBB (Undang-undang No.28 tahun 2009). Jadi subjek pajak tersebut dapat berupa pemilik, pemegang kuasa, dan penyewa.

2.6 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2012, dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu:

1. Nilai jual objek pajak (NJOP).
2. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, Besarnya NJOP ditetapkan dengan peraturan Bupati.
3. Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2012:

1. NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 0,10%
2. NJOP diatas Rp 1.000.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 0,20%
3. Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan rumah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya, maka dapat diberikan pengurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pajak bumi dan bangunan..

2.7 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan, bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil redistribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.8 Penelitian Terdahulu

Menurut Tirie (2016) efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kota Bitung sangat efektif, Kota Tomohon efektif, dan Kota Manado cukup efektif. Dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kota Bitung kurang, Kota Tomohon kurang, Kota Manado sangat kurang.

Menurut O. Polli (2014) tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan sudah cukup efektif setiap tahunnya. Kontribusi yang diberikan PBB terhadap pendapatan daerah belum memberikan kontribusi yang cukup untuk mempengaruhi jumlah pendapatan daerah. Kontribusi terbesar selama tahun 2008-2012 yaitu pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2008. Untuk tingkat pertumbuhan mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2009 yang berada pada posisi negatif.

Penelitian oleh Kakunsi (2013) menunjukkan mekanisme pelaporan PBB sudah berjalan dengan baik dan kontribusi PBB terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2008-2012 berdasarkan pengukuran kinerja

sudah memberikan kontribusi positif yang terus meningkat.

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sekaran & Bougie (2013:97) studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka dan memerhatikan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik.

3.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar (BPKKD).

3.3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder dan data primer. Menurut sugiyono (2012:137) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Sekunder mengacu kepada data yang dikumpulkan dengan cara dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Sekaran (2013:113) data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan wawancara. Menurut Arikunto (2010:201) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar. Majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari laporan target dan realisasi penerimaan PBB P2 dan laporan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar. Menurut Sugiyono (2012:194) wawancara dilakukan sebagai upaya mendapatkan informasi untuk permasalahan

yang diteliti, dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil dengan menggunakan panduan menyerupai kuesioner untuk mengurutkan pertanyaan pada saat wawancara. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan dialog bersama dengan staf bagian penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

3.5 Operasionalisasi Variabel

3.5.1 Efektivitas

penelitian Untuk mengetahui efektivitas penerimaan PBB P2 terhadap pendapatan asli daerah dapat daerah dilakukan dengan menghitung perbandingan antara penerimaan dan potensi pajak bumi dan bangunan tahun 2014-2016. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan diperoleh dari seluruh jumlah pajak bumi dari dan bangunan dari setiap kecamatan di Aceh Besar. Efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Adelina,2012)

$$\text{Efektivitas PBB P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Target Penerimaan PBB P2}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1

Interprestasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, kepmendagri No. 690.900.327 (Adelina, 2012)

3.5.2 Kontribusi

Menurut Yandianto (2000:282), kontribusi adalah sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut (velayati at al:2013)

$$\text{Kontribusi PBB P2} = \frac{\text{Realisasi PBB P2}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Penilaian kinerja rasio kontribusi dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, kepmendagri No. 690.900.327 (Velayati *at al*, 2013)

3.5.3 Metode Analisis Data

Penelitian Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat tabel penerimaan pajak bumi dan bangunan dan realisasi pajak bumi dan bangunan yang datanya diperoleh dari BPKKD Kabupaten Aceh Besar.
2. Menghitung efektivitas per tahun dengan membandingkan antara penerimaan dan realisasi pajak bumi dan bangunan. Untuk menilai efektif tidaknya penerimaan pajak bumi dan bangunan, maka dapat dilihat pada tabel interpretasi nilai efektivitas.
3. Menghitung kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun selama tahun 2014-2016.
4. Membandingkan hasil perhitungan efektivitas dengan interpretasi nilai efektivitas, sehingga diketahui tidak efektif, kurang efektif, cukup, efektif, sangat efektif, penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
5. Membandingkan hasil perhitungan kontribusi dengan klasifikasi kriteria kontribusi, sehingga diketahui kriteria dari kontribusi yang diterima

pendapatan asli daerah dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, kriteria tersebut bisa sangat kurang, kurang, sedang, cukup baik, baik, dan sangat baik.

6. Menganalisis hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan tabel interpretasi nilai efektivitas. Apabila perhitungan efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mendekati atau melebihi 100% maka penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan semakin efektif.
7. Menganalisis hasil perhitungan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah berdasarkan

klasifikasi kriteria kontribusi, hasil analisis yang didapatkan akan nampak kontribusi terbesar dan terkecil dari tahun ke tahun. Apabila kontribusi yang diterima mendekati atau melebihi 50% maka kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan semakin baik.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Efektivitas Penerimaan PBB P2

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar, hasil persentase efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Penerimaan PBB P2 di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014-2016

No	Tahun	Target PBB P2 (Rp)	Realisasi PBB P2 (RP)	Persentase Realisasi	Kriteria
1	2014	2.500.000.000,00	2.340.536.940,00	93,62%	Efektif
2	2015	2.500.000.000,00	2.508.585.445,80	100,34%	Sangat efektif
3	2016	2.500.000.000,00	2.658.655.011,38	106,35%	Sangat efektif
Rata-rata				100.10%	Sangat efektif

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.2 tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan rata-rata dari tahun 2014-2016 adalah sebesar 100.10% yang dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2014 tidak melebihi target yang telah ditetapkan dengan besar 93.62 %, hal ini terjadi dikarenakan setelah dilimpahkan ke daerah, pemerintah daerah belum melakukan validasi keakuratan data subjek dan objek pajak. Data yang diterima dari pemerintah pusat yang disampaikan kepada masyarakat banyak mengalami penolakan karena tidak sesuai datanya baik identitas pemilik maupun luas dan jenis bangunan sehingga para wajib pajak enggan melunasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tersebut. Tahun 2015 terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu penerimaan PBB P2 sebesar 100,34% sehingga dapat dikategorikan sangat efektif, kenaikan ini dikarenakan adanya penambahan wajib pajak yang harus membayar PBB P2. Pada tahun 2016

terjadi kenaikan yang sedikit meningkat dari tahun sebelumnya dimana penerimaan PBB P2 sebesar 106,35% dan dapat dikategorikan sangat efektif. Peningkatan penerimaan PBB P2 tidak diikuti dengan meningkatkan penetapan target yang dikarenakan kemampuan daerah dalam merealisasikannya. Penetapan target penerimaan yang telah dilakukan bukan hanya berdasarkan kondisi realisasi PBB P2 saja. Banyak indikator lain yang menjadi pertimbangan seperti data subjek dan objek pajak maupun aspek secara akuntansi. Contohnya saja jika data dari pusat yang belum dilakukan update data, para wajib pajak akan menolak untuk membayar. Target yang ditetapkan akan mengalami penurunan secara realisasi. Secara akuntansi jika realisasi lebih kecil dari terget maka akan mengakibatkan membesarnya nilai piutang dan piutang tersebut juga nantinya akan sulit dilakukan penagihan karena data belum sesuai. Pemerintah daerah sendiri kurang tepat dalam menetapkan target kurang tepat. Pada tahun 2015

realisasi penerimaan PBB P2 telah meningkat dari tahun sebelumnya akan tetapi pemerintah daerah pada tahun 2016 tetap menetapkan target yang sama dengan tahun sebelumnya agar terlihat penerimaan PBB P2 tahun 2016 mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil ini mendukung penelitian Tirie (2016) dan prathiwi (2015) yang menjelaskan tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dikategorikan sangat efektif.

4.2 Kontribusi PBB P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Besarnya kontribusi penerimaan PBB P2 terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Kontribusi PBB P2 terhadap PAD

Tahun	Realisasi PBBP2 (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2014	2.340.536.940,00	113.855.075.369,30	2,06%	Sangat Kurang
2015	2.508.585.445,80	113.607.390.223,73	2,21%	Sangat Kurang
2016	2.658.655.011,38	135.569.098.961,89	1,96%	Sangat Kurang
Rata-rata			2,08%	Sangat Kurang

Sumber: data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah rata-rata dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 2.08%, berdasarkan kriteria kontribusi tersebut termasuk sangat kurang. Pada tahun 2014 kontribusi PBB P2 sebesar 2.06%, yang menunjukkan bahwa kontribusi PBB P2 terhadap PAD masih tergolong sangat kurang. Selanjutnya pada tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 2.21% dari tahun sebelumnya peningkatan ini dikarenakan realisasi pendapatan asli daerah tahun ini menurun dari tahun sebelumnya, walaupun penerimaan PBB P2 meningkat namun kontribusi terhadap PAD masih sangat kurang. Pada tahun 2016 bahkan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menurun menjadi 1.96%. Kontribusi PBB P2 yang masih kecil dikarenakan pertumbuhan persentase pendapatan asli daerah lebih besar dari pertumbuhan pajak bumi dan bangunan. Pemerintah masih belum memandang penting penerimaan PBB P2, sehingga penerimaan PBB P2 optimal yang mengakibatkan hasil penerimaan belum maksimal, banyaknya masyarakat yang menunggak pembayaran PBB P2, masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB P2 itu sendiri. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan

kontribusi PBB P2 dengan melakukan update data dan menggali potensi baru melalui kegiatan pendataan ke lapangan. Pemerintah daerah tidak hanya melakukan update data akan tetapi pemerintah dapat melakukan sosialisasi, sehingga dapat diketahui penyebab masyarakat tidak membayar PBB P2. Selain melakukan sosialisasi, pemerintah dapat memasang spanduk mengenai pembayaran PBB P2. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Tirie (2016) yang menjelaskan Kontribusi PBB P2 terhadap PAD masih sangat kurang.

5 Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata presentase sebesar 100.10%. Meskipun dikategorikan sangat efektif akan tetapi pemerintah belum bisa dikatakan berhasil dalam pengelolaan PBB P2 dikarenakan peningkatan penerimaan PBB P2 tidak di ikuti dengan meningkatkan penetapan

target, sehingga setiap tahun target yang ditetapkan sama. Pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan PBB P2 telah melakukan berbagai cara yaitu dengan melakukan pendataan kembali terhadap subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tersebut, serta melakukan sosialisasi masyarakat tentang Qanun PBB P2 dan kontribusinya bagi pembangunan daerah.

- 2) Kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Besar dikategorikan sangat kurang, dimana rata-rata persentase hanya 2.08%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Besar kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PBB P2 yang menyebabkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang. Kontribusi yang diterima masih kurang dikarenakan pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kontribusi dengan melakukan update data dan menggali potensi baru dengan melakukan pendataan ke lapangan.

5.2 Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditemukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan terus menggali potensi-potensi yang masih ada di Kabupaten Aceh Besar dengan begitu akan menambah penerimaan PBB P2 sehingga akan mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah diharapkan mengadakan sosialisasi perpajakan secara intensif agar wajib pajak dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk membayar PBB P2 tepat waktu dengan jumlah yang sesuai, sosialisasi dapat dilakukan dengan memasang spanduk mengenai pembayaran PBB P2 yang memberitahukan bahwa SPPT telah diterbitkan dan dapat di ambil di kantor Keuchik, mencantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB P2 serta sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melunasi pembayaran pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas, dengan menambah variabel penelitian, sehingga analisis penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, memperluas ruang lingkup wilayah penelitian sehingga penelitian tidak hanya dilakukan di satu daerah Kabupaten/Kota, tetapi dapat dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota yang dapat memberikan hasil yang lebih kuat dan memuaskan dan peneliti selanjutnya dapat melakukan perbandingan antara Kabupaten/Kota.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adelina, Rima. 2012. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*. Universitas Negeri Surabaya. Skripsi.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
<http://www.acehbesarkab.go.id>. [27/10/16]
<http://www.lintasnasional.com/2016/04/16/warga-aceh-besar-nilai-pemerintah-aceh-tidak-adil/>. [13/05/17]
- Kakunsi, Indah Eunike. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No. 4 Desember 2013.
- Madiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Madiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Jilid 2*. Yogyakarta UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- McCluskey, William J., & France Plimmer 2011. The Creation of Fiscal Space for the Property Tax: *The Case of Central And Eastern Europe*. *International Journal of Strategic Property Management*, Vol. 15, Issues 2, pp: 123-138.
- Nurbowo, Surendro. 2016. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP*. Vol.4 No. 1 Maret 2016.

- O. Polli, Sumena. 2014. Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado. *Jurna EMBA*. Vol. 2 No. 4 Desember 2014.
- Prathiwi, Ida Ayu Metha Apsari. 2015. Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Efektivitas Penerimaannya di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014. *e-Journal SI AK*. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Denpasar.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. *Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sekaran, Uma & Roger Bougie. 2013. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Fifth Edition. USA: Willey
- Tang, Bo-Sin, Siu-wai Wong & Sing Cheong Liu 2011. *Institutions, Property Taxation and Local Government Finance in China. Issues of Urban Studies*, Vol. 48, No. 5, pp:847-875.
- Tirie, B., Sondakh, J.J., & S.K. Walandouw. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 sebagai Sumber PAD di Kota: Tomohon, Manado, dan Bitung. *Jurnal EMBA*. Vol.4 No. 2 Juni 2016.
- Velayati, M Rizkika, et al. 2013. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggal Pajak*. *Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baru Tahun 2010-2012*. Universitas Brawijaya. Skripsi.
- Yandianto. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: M2S